



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

POTENSI PASAR INDUSTRI KECANTIKAN DI INDONESIA

Fadila Puti Lenggo Geni
Analisis Legislatif Ahli Pertama
fadila.geni@dpr.go.id

Eka Budiyantri
Analisis Legislatif Ahli Madya
eka.budiyantri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Industri kecantikan dan kosmetik nasional memiliki potensi pasar yang sangat besar. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan industri kecantikan yang pesat, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan diri. Berdasarkan data dari Jakpat 2024 mengenai tren industri kecantikan, rata-rata individu menggunakan 4-5 produk *make up* setiap harinya. Sebanyak 79 persen individu merasa lebih percaya diri ketika tampil di depan umum dengan memakai kosmetik. Selain produk kecantikan, ada juga *body care*, *skin care*, serta produk lainnya seperti sabun khusus untuk kulit sensitif atau kulit yang memiliki masalah sejak lahir.

Di Indonesia, besarnya pangsa pasar industri kecantikan didukung oleh potensi pelaku usaha dan bahan baku yang besar. Pada tahun 2024, diperkirakan nilai pasar industri kecantikan di Indonesia mencapai Rp146 triliun, dengan estimasi 100.400 salon, 5.000 *barbershop*, dan 3,97 juta unit ritel yang mendistribusikan produk kecantikan dan perawatan pribadi. Dari sisi konsumen, seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak yang sadar akan pentingnya komponen yang digunakan dalam kosmetik dan *body care* sehingga semakin banyak yang beralih ke produk kecantikan alami. Hal ini tidak hanya karena kualitas dan keamanannya terhadap kesehatan, tetapi juga karena dianggap lebih ramah lingkungan.

Kekayaan biodiversitas dan ragam bahan alami di Indonesia menawarkan peluang besar untuk mendukung pertumbuhan industri kecantikan nasional dari sisi bahan baku. Beberapa bahan alami yang dapat digunakan sebagai pemutih alami meliputi temulawak, bengkuang, delima, ekstrak daun nangka, dan alamanda, mudah ditemukan di Indonesia dengan jumlah yang melimpah. Penelitian atas biodiversitas untuk kecantikan juga terus berkembang hingga saat ini. Minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak sawit terbukti dapat menjadi bahan baku kosmetik. Selain bahan baku dari darat, bahan dari laut seperti rumput laut, sisik ikan, dan alga juga dapat dimanfaatkan untuk industri kecantikan.

Penting untuk diingat bahwa industri kecantikan tidak hanya mencakup kosmetik, tetapi juga perawatan diri dan kesehatan kulit, sehingga industri ini menyasar berbagai kalangan dan menawarkan manfaat yang tinggi. Selain berkembang dalam skala bisnis, industri kecantikan juga memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi nasional, dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka di sektor ini. Mengingat besarnya dampak dari industri ini, industri kecantikan tidak hanya bersifat eksklusif, melainkan sudah seharusnya inklusif.

Melihat potensi besar ini, pemerintah merespons dengan serius dengan merencanakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Serpong dan Bali yang berfokus mendukung sektor kecantikan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga mendukung dengan memastikan adanya pengembangan herbal dan terapi sel untuk mendongkrak industri kecantikan nasional. Peran peneliti dan akademisi sangat penting, mengingat tingginya manfaat

biodiversitas diharapkan dapat memotivasi untuk melakukan penemuan baru yang dapat diterima di pasar global.

Tidak hanya itu, inovasi dan kolaborasi antara pelaku industri kecantikan dan pengobatan dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu terus digalakkan agar dampaknya lebih merata dan dirasakan oleh berbagai kalangan. Untuk mewujudkan kolaborasi antara pelaku UMKM dan pelaku industri yang saling mendukung, persoalan kemitraan dan tata kelola UMKM di sektor ini harus mendapat perhatian lebih. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, berharap perusahaan-perusahaan besar tidak hanya fokus berinvestasi, tetapi juga membangun ekosistem industri yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembahasan dan skema hilirisasi industri kecantikan dari biodiversitas dengan melibatkan berbagai *stakeholder* perlu segera dikaji oleh pemerintah.

Atensi DPR

Produk kecantikan berbahan alami memiliki pangsa pasar yang besar dan diminati banyak konsumen. Oleh karena itu, industri kecantikan diharapkan tumbuh dengan baik, terutama dengan adanya dukungan dari kekayaan biodiversitas sebagai bahan bakunya. Pertumbuhan industri kecantikan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional, terciptanya lapangan kerja, dan perkembangan UMKM yang melakukan kemitraan dengan pelaku industri kecantikan. Untuk itu pertumbuhan industri kecantikan perlu lebih mendapat perhatian. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi VII DPR RI perlu mendukung rencana pemerintah membangun KEK di Bali dan Serpong yang berfokus pada industri kecantikan. Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk: 1) memfasilitasi pelaku usaha kecantikan mendapatkan sertifikasi BPOM; 2) memberikan kemudahan investasi berbasis lingkungan untuk pengembangan biodiversitas; 3) berkolaborasi dengan peneliti/akademisi untuk melakukan *research* untuk menghasilkan inovasi; 4) mendorong kemitraan pelaku industri kecantikan dan UMKM; serta 5) membuat skema hilirisasi industri kecantikan berbasis kolaborasi antarpemangku kepentingan guna menciptakan kondisi inklusif pada sektor ini.

Sumber

ekonomi.bisnis.com, 7 februari 2025;

kumparan.com, 9 Februari 2025;

lestari.kompas.com, 11 Februari 2025;

Siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 6 Februari 2025;

suara.com, 11 Februari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making